



Peran dan Fungsi Humas dalam Publikasi pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Mahmud Mahmud^{1*}, Fatmawati Fatmawati², Ismail Ismail³

¹⁻³Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11, Indonesia

Korespondensi penulis: mahmudabuatifah@gmail.com*

Abstract. *The success of government publications to the public cannot be separated from the role of public relations (public relations). Public relations or better known as PR (Public Relations) has a very large role and is very much needed by leaders. "Publication is very important, because then the public will know what the leaders or regional heads are doing. If there is no publication, it is as if the regional head is not working even though he has worked hard. This study aims to find out the role and function of Public Relations in Publication at the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Office. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach, the data collection technique is through observation, interviews and documentation. while the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that one of the roles of public relations at the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Office is to make publications about the activities of the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Office which have an impact on how to create a good image for OPD (Regional Apparatus Organizations). these publication activities are published through social media, print media or electronic media. The social media used include Facebook, Instagram, YouTube, but it is still in personal content, not on the official website of the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Service. Later, after being thrown to the public, it will be entered into the official website of the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Service. The function of public relations in the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Service is how to provide information to the public or community, in other words, how to invite other Regional Apparatus Organizations to popularize news about the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Service, especially the South Sulawesi Provincial Marine and Fisheries Service.*

Keywords: *Role and Function, Public Relations, Publication*

Abstrak. Suksesnya publikasi oleh pemerintah kepada masyarakat tidak lepas dari peran humas (hubungan masyarakat). Humas atau yang lebih dikenal dengan PR (Public Relation) mempunyai peran sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh pimpinan. "Publikasi itu sangat penting, karena dengan demikian masyarakat akan tahu apa saja yang sedang dilakukan pimpinan atau kepala daerah. Bila tidak ada publikasi, maka seolah-olah kepala daerah tidak bekerja walaupun telah bekerja keras. Adapun penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Peran dan Fungsi Humas Dalam Publikasi pada Kantor dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Salah satu peran humas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah membuat publikasi-publikasi tentang kegiatan-kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dampaknya kepada bagaimana menciptakan citra yang baik bagi OPD (Organisasi perangkat Daerah). kegiatan publikasi tersebut dipublikasikan melalui media sosial, media cetak atau media elektronik. adapun media sosial yang digunakan diantaranya facebook, instagram, youtube tapi itu masih dalam konten pribadi bukan pada web resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan nanti setelah dilempar ke public baru di masukkan ke web resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel. Adapun fungsi humas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagaimana menyediakan penerangan kepada public atau masyarakat dengan kata lain bagaimana mengajak Organisasi Perangkat Daerah lain untuk memasyarakatkan berita-berita tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan utamanya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Peran Dan Fungsi, Humas, Publikasi

1. LATAR BELAKANG

Suksesnya publikasi oleh pemerintah kepada masyarakat tidak lepas dari peran humas (hubungan masyarakat). Humas atau yang lebih dikenal dengan PR (Public Relation) mempunyai peran sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh pimpinan. “Publikasi itu sangat penting, karena dengan demikian masyarakat akan tahu apa saja yang sedang dilakukan pimpinan atau kepala daerah. Bila tidak ada publikasi, maka seolah-olah kepala daerah tidak bekerja walaupun telah bekerja keras.

Keberadaan unit kehumasan disebuah lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk masyarakat ke dalam maupun kepada masyarakat luar umumnya. Menurut John D. Millet dalam Rosady Ruslan (2001 : 108) mengemukakan peran humas/ PR dinas instansi atau lembaga pemerintahan terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai berikut : pertama, Mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan, dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration). Kedua, Kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should desire). Ketiga, Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official). Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/ instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and about what agency is doing.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Kantor Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka agar mendapatkan trust atau kepercayaan dari publik maka Humas mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi ataupun mempublikasikan berita-berita terkait dengan apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kantor Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat di pengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Menurut Soekamto, (Agus , 2011:7), peran merupakan aspek yang dinamis dalam

kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa dalam Agus (2011:6) mengemukakan beberapa di mensei peran sebagai berikut : (a) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik di laksanakan, (b) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public 7 support). Pendapat ini di dasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, (c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, (d) peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat- pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidak percayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess) dan (e) peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran di lakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat..

Pengertian Humas

Pengertian Humas adalah fungsi manajemen yang berusaha membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik yang menjadi penentu kesuksesan dan kegagalannya. Ruslan (2013:6) menyatakan: Humas merupakan seni dan gabungan dari disiplin ilmu manajemen, komunikasi, psikologi, sosial dan marketing untuk membentuk agar perusahaan atau lembaga, gagasan atau ide yang ditawarkan, nama dan produknya menjadi disukai dan dapat dipercaya oleh public.

Adapun Butterick (2012:7) berpendapat bahwa Humas adalah fungsi manajemen unik yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerja sama antara organisasi dan publiknya, melibatkan manajemen permasalahan dan isu, membantu manajemen untuk terus menginformasikan dan tanggap terhadap opini publik, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan

umum, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, melayani sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah kecenderungan negatif, dan menggunakan penelitian yang sehat dan etika komunikasi sebagai alat utamanya.

Peran Humas

Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki, maka ia telah menjalankan perannya. Humas sebenarnya sebagai alat manajemen modern secara struktural merupakan bagian internal dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan perusahaan. Hal tersebut menjadikan humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya visi, misi dan tujuan bersama dari organisasi atau lembaga tersebut. Peranan humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat dengan adanya beberapa aktivitas pokok kehumasan yaitu: a. Mengevaluasi sikap atau opini publik; b. Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi atau perusahaan dengan kepentingan publiknya; c. Merencanakan dan melaksanakan penggiatan aktivitas humas. Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi atau lembaga dalam berbagai aktivitas adalah sebagai berikut :

1. Membina hubungan kedalam (public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan dan organisasi itu sendiri. Seorang humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu di jalankan oleh organisasi.
2. Membina hubungan keluar (public eksternal) adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Menurut Fayol beberapa kegiatan dan sasaran humas adalah sebagai berikut: 1. Membangun identitas dan citra perusahaan, yaitu : Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif; Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai pihak. Menghadapi krisis, dalam menangani keluhan dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan memulihkan krisis tersebut.
2. Mempromosikan aspek kemasyarakatan, mempromosikan kebijakan atau program yang menyangkut kepentingan publik; dan Mendukung kegiatan kampanye sosial..

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan mengenai Peran dan fungsi Humas Dalam publikasi di Kantor Dinas Kalautan Propinsi Sulawesi Selatan. Informan penelitian di

pilih secara purposive. Informan penelitian pada tahap awal di pilih orang yang memiliki pengetahuan tentang humas pada obyek yang di teliti, sehingga dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Humas, dan Staf Bagian Humas Dinas Kelautan Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder dimana Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan penelitian tentang Peran dan fungsi Humas dalam publikasi di Kantor Dinas Kalautan Propinsi Sulawesi Selatan. dan Data sekunder yaitu data yang di peroleh bukan dari sumber asli atau pertama tetapi bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data di lakukan melalui beberapa tahap Menurut Sugiyono (2009:366), dengan langkah sebagai berikut : Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Humas pemerintah merupakan bagian dari organisasi sesuatu departemen/lembaga non departemen yang memainkan peranan yang cukup penting. Adapun yang menjadi dasar pembentukan kegiatan Humas adalah adanya anggapan bahwa jika masyarakat diberitahu masalahnya, maka masyarakat dapat bersikap wajar dan bijaksana. Karena pada dasarnya masyarakat itu merupakan pihak yang tanggap dan sadar terhadap kebenaran. Humas sebagai tangan kanan, mata dan telinga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memantapkan program-program pemerintah. Humas harus mampu menghadapi segala perubahan dan ikut serta dalam menangani permasalahan yang terjadi pada suatu perusahaan, termasuk pada lembaga pendidikan.

Prof. Onong Uchjana Effendy (2004), guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, dalam bukunya berjudul Ilmu Komunikasi, menjelaskan ada tiga fungsi yang dimiliki oleh pemraktek hubungan masyarakat. Fungsi pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi opini publik yang berkaitan dengan organisasinya. Fungsi kedua, menasihati para eksekutif (dalam hal ini pengambil kebijakan) mengenai cara-cara menangani opini publik yang timbul. Sedangkan fungsi yang ketiga, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi opini publik.

Tidak munculnya Humas sebagai corong pemerintah dihadapan publiknya, semakin memperjelas buruknya kinerja Humas dihadapan publik dan organisasinya. Seharusnya dengan menjalankan fungsi manajemen komunikasi yang baik, Humas diharapkan mampu membangun ruang publik yang memberikan kanal bagi proses komunikasi dan interaksi

seimbang antara pemerintah dengan publik dan sebaliknya. Akan tetapi, realitanya Humas pemerintah belum bisa berbuat banyak atau belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Belum maksimalnya kerja Humas ini disebabkan oleh karena adanya berbagai macam kendala yang dihadapi, seperti kendala dalam pola koordinasi, kelembagaan, kompetensi SDM, infrastruktur, terbatasnya akses/kewenangan Humas, dan masih kurangnya komitmen dari top pimpinan.

Pertama, pola koordinasi bagian Humas dengan bagian lain tidak terjalin dengan baik. Hal ini akan menyebabkan tidak terintegrasinya antara program Humas dengan program bagian lain di lingkungan pemerintahan. Seharusnya program yang ada di Humas harus saling mendukung dengan program yang ada di bagian lain tersebut. Jadi apabila publik ingin mendapatkan sebuah informasi tentang kebijakan pemerintah maka bagian Humaslah yang akan memberikan informasi tersebut. Dengan demikian, ketika ada masalah di suatu bagian yang menyangkut citra sebuah organisasi pemerintahan, maka Humaslah yang akan maju ke depan dalam menjawab setiap keingintahuan publik dengan informasi yang diperoleh dari bagian yang terkena masalah tersebut. Karena secara universal, Humas adalah corong informasi bagi sebuah lembaga, artinya, informasi yang dikeluarkan oleh lembaga hanya boleh keluar dari satu pintu, yaitu Humas. Hal ini untuk menjaga bias dan keambiguan atas informasi yang dikeluarkan oleh lembaga. Dengan demikian, setiap pengambil kebijakan dalam lembaga harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada Humas atas kebijakan yang dikeluarkannya, yang kemudian akan diinformasikan kepada publik.

Kedua, kedudukan Humas dalam struktur suatu kelembagaan yang belum berarti. Humas oleh sebagian pemerintahan daerah belum dianggap sebagai bagian yang sangat berperanan penting. Humas hanya dianggap sebagai pelengkap dalam struktur sebuah organisasi pemerintah. Tidak berperannya Humas di suatu pemerintahan lebih disebabkan oleh karena kewenangan yang diberikan sangat terbatas dan juga SDM Humas sendiri yang tidak berkompetensi. Ada anggapan bahwa Humas adalah tempat buangan atau pegawai yang tidak terpakai di tempat lain. Pada hal, secara struktural, fungsi Humas dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. Seharusnya kedudukan Humas terkait langsung dengan fungsi top manajemen. Fungsi kehumasan dapat berhasil secara optimal apabila langsung berada dibawah pimpinan atau mempunyai hubungan langsung dengan pemimpin tertinggi (pengambil keputusan) pada organisasi/instansi bersangkutan.

Ketiga, SDM Humas yang tidak profesional atau penempatannya tidak sesuai kompetensinya. Bagian Humas tak mungkin dapat melaksanakan tugas dengan baik jika SDM-nya tidak dibenahi. Pada intinya, SDM Humas terutama praktisi atau pranata Humas harus piawai dalam melakukan negosiasi atau melakukan teknik melobi dan sebagainya. Pemangku jabatan sebagai Humas seharusnya bukan orang buangan yang asal dicomot dari fungsi lain untuk menduduki jabatan Humas. Jabatan Humas harus dijabat oleh orang yang benar-benar profesional, bukan diciptakan by accident tapi by design. Pranata Humas kedudukannya sangat penting dan strategis, yaitu sebagai komunikator publik dan sebagai mediator yang proaktif. Sebagai komunikator publik, pranata Humas harus bisa menjadi sumber informasi resmi pemerintah, mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarkan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja lembaganya. Sedangkan sebagai mediator Pranata Humas harus bertindak proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pranata Humas sebagai agen pembentuk opini publik, harus mampu berperan sebagai agen yang menghubungkan organisasi dengan publiknya. Pranata Humas Pemerintah harus bisa menyampaikan komunikasi dan informasi secara baik dan jelas, sehingga tidak menjadikan missskomunikasi dan missinformasi.

Keempat, kurangnya dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur di bidang Humas. Dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh Humas supaya Humas tidak ketinggalan teknologi dan informasi. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan begitu cepatnya penyebaran informasi seharusnya juga disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung terhadap kinerja Humas. Bagian Humas harus ditingkatkan sesuai kebutuhan. Perangkat yang sangat dibutuhkan saat ini adalah fasilitas internet, karena informasi harus dengan cepat diakses dan disebarkan kepada pihak yang membutuhkan. Peran sebagai teknisi mewakili seni dari Humas seperti menulis berita, mengedit berita, mengklarifikasi berita, mengambil foto, menangani produksi komunikasi, membuat event spesial, membuat sambutan, membuat makalah, membuat komunikasi dengan media/wartawan dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi (IT).

Kelima, terbatasnya akses dan kewenangan Humas itu sendiri. Peran Humas sering dikebiri, susah bergerak, tidak bisa mengembangkan kreasi sendiri, tidak bisa membuat terobosan-terobosan baru guna menguatkan fungsi dan peranan Humas. Hal ini disebabkan karena akses dan kewenangan Humas di pemerintahan itu yang terbatas. Pada prakteknya,

Humas itu perlu akses yang leluasa seperti ke pejabat. seperti di sektor swasta, pemimpin ke pejabat eksekutif itu penting. Semakin tinggi masalah publik, semakin tinggi akses yang diberikan kepada Humasnya. Dilihat dari proses integrasi dari programnya, masih banyak program Humas pemerintah yang terkotak-kotak.

Keenam, kurangnya komitmen dari pimpinan organisasi. Fungsi Humas tak mungkin dapat berjalan dengan baik, jika tidak ada komitmen dari pimpinan untuk memberikan ruang gerak bagi Humas untuk bekerja sesuai fungsinya. Pengaruh pimpinan ini sangat dominan, karena mereka unsur kunci lahirnya kebijakan. Pimpinan harus memiliki pandangan yang sama, bahwa Humas adalah penyampai informasi resmi pemerintah. Untuk itu, Humas harus diberikan kewenangan guna mengali informasi seluasnya dan menyampaikannya ke masyarakat, sesuai proporsi dan batas kewenangannya. Pimpinan juga harus memahami, berita yang disampaikan tidak harus mengenai keberhasilan pemerintah tetapi juga segala permasalahan yang dihadapi. Semua aktivitas yang berhubungan dengan kehumasan dijalankan oleh bagian Humas dibawah pengawasan langsung oleh pimpinan. Jadi, dengan masih banyaknya kendala dan permasalahan yang mengelilingi Humas, maka akan membuat fungsi Humas itu selalu tumpul dan sulit untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan profesional. hal ini juga terjadi di DKP Sulsel. Untuk itu, sangat diperlukan sekali komitmen bersama antara pimpinan, bidang Humas dan bagian lain dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan peran dan fungsi Humas di suatu lembaga pemerintah. Apa lagi pada era arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik saat ini, peran Humas semakin penting dan strategis.

Oleh karena itu, bidang kehumasan tidak bisa dipandang sebelah mata. Bidang Humas masih sangat diperlukan dalam menyediakan sumber informasi bagi publik. Pemerintah yang tak memanfaatkan bidang tersebut bakal tertinggal karena tak menguasai perolehan dan penyebaran informasi. Keberadaan bidang komunikasi dan hubungan masyarakat bukan hanya perlu untuk membina hubungan dengan pihak luar. Namun pula, ini sangat penting untuk memberikan informasi ke dalam, baik kepada pimpinan maupun sesama pegawai Humas. Sikap membuka diri terhadap kritik dari masyarakat, termasuk membuka dialog, melakukan komunikasi persuasif, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan Humas merupakan “is a must”. Kata kunci dari hubungan dua arah ini adalah informasi dan komunikasi. Humas memiliki peran vital dalam menyediakan informasi yang benar dan tepat waktu kepada masyarakat, termasuk pers. Information is power, maka siapa yang menguasai informasi akan berada dalam garis terdepan. Dan sudah seharusnya Humas menjadi garda paling depan untuk menjembatani komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Jangan sampai krisis

kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah semakin buruk karena masyarakat bingung kemana arah informasi yang benar dan valid. Maka perbaikan peran kehumasan adalah sebuah keniscayaan. Humas harus perlu tetap dipertahankan bahkan harus ditingkatkan perannya. Salah satunya adalah dengan cara menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan bagian-bagian lain dari suatu lingkungan pemerintahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu peran humas di DKP Sulsel adalah membuat publikasipublikasi tentang kegiatan-kegiatan DKP Sulsel yang dampaknya kepada bagaimana menciptakan citra yang baik bagi OPD. kegiatan publikasi tersebut dipublikasikan melalui media sosial, media cetak atau media elektronik. adapun media sosial yang digunakan diantaranya facebook, instagram, youtube tapi itu masih dalam konten pribadi bukan pada web resmi DKP nanti setelah dilempar ke public baru di masukkan ke web resmi DKP Sulsel. Adapun fungsi humas di DKP Sulsel adalah bagaimana menyediakan penerangan kepada public atau masyarakat dengan kata lain bagaimana mengajak OPD lain untuk memasyarakatkan berita-berita tentang DKP utamanya DKP Sulsel. b. Dalam mengembangkan peran dan fungsi humas di DKP Sulsel maka diantara usaha yang dilakukan adalah dengan membuka akses dengan OPD lain dengan kata usaha yang dilakukan secara internal dulu yang meliputi CPO dan UPT akses ini perlu diperkuat dahulu setelah itu baru merambah keluar secara eksternal ke OPD-OPD lain dan media-media lain yang ada di Sulsel.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Butterick, K. (2012). *Pengantar public relations: Teori dan praktik* (N. Hasfi, Trans.). Rajagrafindo Persada.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective public relations* (7th ed.). Prentice-Hall.
- Effendy. (2010). *Human relations dan public relations dalam manajemen*. CV. Mandar Maju.
- Firsan, N. (2011). *Crisis public relations*. Kencana.
- Kriyantono, R. (2008). *PR: Media public relations membangun citra korporat*. Kencana.
- Kusumastuti, F. (2002). *Dasar-dasar humas*. Ghalia Indonesia.
- Londa, J. W. (2014). Peran petugas humas sebagai komunikator pembangunan (Studi di bagian humas Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan). *Acta Diurna*, 3(2), 16.

- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revised ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Rachmadi, F. (1996). *Public relations dalam teori dan praktek: Aplikasi dalam badan usaha swasta dan lembaga pemerintah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi. (2010). *Pengantar hubungan masyarakat*. PT Rosda Karya.
- Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosady, R. (2007). *Manajemen public relations dan media komunikasi: Konsepsi dan aplikasi*. Raja Grafindo.
- Ruslan. (2001). *Manajemen humas & manajemen komunikasi: Konsep dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Ruslan. (2010). *Manajemen public relations dan media komunikasi: Konsepsi dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Ruslan. (2012). *Manajemen public relations dan media komunikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan. (2013). *Kiat dan strategi kampanye public relations*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wasesa. (2005). *Strategi public relations*. Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Jurnal

- Lubis, E. E. (2012). Peran humas dalam membentuk citra pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 51-56.
- Permata Lani, Oktri, & Handayani, B. (2021). Peranan humas pemerintahan (government public relations) dalam menciptakan reputasi pemerintahan yang baik. *Lontar Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2).
- Sani, A. H., Hidayat, M., & Syafirah, N. A. (2010). Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran humas pemerintah. *Profesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*.